

# Catatan Kritis Pengelolaan PNBP di Kepolisian RI

Indonesia Corruption Watch

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Jakarta, 10 Januari 2017

# Pendahuluan

- Per tanggal 2 Desember 2016 Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada kepolisian RI.
- PP ini merupakan pengganti PP 50/2010 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.
- Pada satu sisi lahirnya PP ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan PNBP pada kepolisian dan diharapkan akan juga berdampak pada kenaikan kualitas layanan khususnya lalu lintas.
- Tetapi disisi lain adanya kenaikan tarif juga dianggap akan memberatkan masyarakat pengguna, terlebih dengan masih belum baiknya pelayanan yang diberikan.
- Dalam konteks transparansi dan akuntabilitas khususnya di lingkungan internal kepolisian, penambahan jenis dan kenaikan tarif PNBP ditakutkan akan menjadi lahan penyimpangan atau tindak pidana korupsi.

# Perbandingan Jenis PNBP

No.		PP 31/2004	PP 50/2010	PP 60/2016
1	Tgl Pengesahan	5 Okto 2004	25 Mei 2010	2 Des 2016
2	Jenis PNBP	7 Jenis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 Lalu lintas</li> <li>• Senpi &amp; Peledak</li> </ul>	12 Jenis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 8 Lalu Lintas</li> <li>• Senpi &amp; Peledak</li> <li>• INAFIS</li> <li>• Lapor Diri</li> <li>• Surat SKCK</li> </ul>	27 Jenis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 Lalu Lintas</li> <li>• Senpi &amp; Peledak</li> <li>• Surat SKCK</li> <li>• 7 DIKLAT</li> <li>• 2 Kartu &amp; Ijazah Pengamanan</li> <li>• SIU Operasi jasa pengamanan</li> <li>• Pelayanan Penilaian</li> <li>• Pelayanan Kesehatan</li> <li>• Jasa Pengamanan dan Jasa Manajemen OBVIT</li> </ul>

# Catatan PP 60/2016

- Lahirnya PP 60/2016 tentang PNBP di Kepolisian merupakan “siklus 6 tahunan”
- PP 60/2016 merupakan dampak keinginan untuk menggenjot penerima negara khususnya bukan pajak.
- Adanya penambahan jenis dan kenaikan sebagian tarif pada komponen PNBP di lingkungan kepolisian.
  - Penambahan jenis PNBP (baru) diantaranya jasa diklat dan pengamanan
  - Kenaikan tarif terutama pada sebagian jasa layanan lalu lintas.
  - Sementara tarif layanan izin senjata api tetap (tidak berubah) sejak 2004, begitu juga izin bahan peledak tidak berubah (tetap) sejak 2010.

# Perkembangan PNBP Layanan Lalu Lintas di POLRI

No	Jenis PNBP	PP 31/2004	PP 50/2010	PP 60/2016
1	Penerbitan SIM Baru	75.000	100.000 – 250.000	100.000 – 250.000
2	Penerbitan SIM Perpanjangan	60.000	75.000 – 225.000	75.000 – 225.000
3	Penerbitan STNK Roda 2/3	25.000	50.000	100.000
4	Penerbitan STNK Roda 4/lebih	50.000	75.000	200.000
5	Penerbitan TNKB Roda 2/3	15.000	30.000	60.000
6	Penerbitan TNKB Roda 4/lebih	20.000	50.000	100.000
7	Penerbitan BPKB Roda 2/3	70.000	80.000	225.000
8	Penerbitan BPKB Roda 4/lebih	80.000	100.000	375.000

- Paska pemisahan, sudah terjadi tiga kali perubahan PP tentang PNBP di kepolisian
- Terjadi kenaikan tarif layanan lalu lintas, terutama 3 komponen utama yaitu layanan STNK, TNKB dan BPKB.

# Penerbitan SIM, 2009 - 2015

SIM YANG DIKELUARKAN Per Tahun, 2009 - 2015							
Jenis :	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>SIM A</b>	1.951.236	1.843.967	2.135.996	2.245.402	2.515.746	2.418.682	2.405.925
<b>SIM BI</b>	363.232	337.687	499.548	417.849	403.855	350.826	328.895
<b>SIM BII</b>	133.952	134.578	282.529	230.301	193.742	138.439	140.366
<b>SIM C</b>	5.582.196	5.589.410	6.160.312	6.331.934	6.525.206	6.353.848	6.368.667
<b>TOTAL</b>	8.030.616	7.905.642	9.078.385	9.225.486	9.638.549	9.261.795	9.243.853

BPS - Statistik Transportasi 2015, sumber Kepolisian RI

- Penerbitan SIM merupakan penyumbang terbesar dalam PNBK kepolisian.
- Berdasarkan statistik transportasi, pada tahun 2009 jumlah SIM yang dikeluarkan (baru, perpanjangan, ganti rusak) sebanyak 8.030.616 izin dan naik menjadi 9.243.853 izin pada tahun 2015. Terjadi kenaikan 15,11% selama periode 2009 – 2015, dengan rician per jenis SIM :
  - SIM A selama periode 2009 – 2015 mengalami kenaikan sebesar 23,3%.
  - SIM C selama periode 2009 – 2015 mengalami kenaikan sebesar 14,09%
  - SIM BII selama periode 2009 – 2015 mengalami kenaikan sebesar 4,79%
  - Sementara SIM BI selama periode 2009 – 2015 mengalami penurunan sebesar 9,45%

# Jumlah Kendaraan Bermotor, 2009 - 2015

JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR, 2009 - 2015							
Jenis :	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Mobil Penumpang</b>	7.910.407	8.891.041	9.548.866	10.432.259	11.484.514	12.599.038	13.480.973
<b>BIS</b>	2.160.973	2.250.109	2.254.406	2.273.821	2.286.309	2.398.846	2.420.917
<b>Mobil Barang</b>	4.498.171	4.687.789	4.958.738	5.286.061	5.615.494	6.235.136	6.611.028
<b>Sepeda Motor</b>	52.767.093	61.078.188	68.839.341	76.381.183	84.732.652	92.976.240	98.881.267
<b>TOTAL</b>	67.336.644	76.907.127	85.601.351	94.373.324	104.118.969	114.209.260	121.394.185

BPS - Statistik Transportasi 2015. Sumber: Kepolisian RI, DLLAJ, Asosiasi Industri

- Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia tiap tahun menunjukkan perkembangan yang positif. Dimana pada tahun 2009 total jumlah kendaraan bermotor di Indonesia adalah 67.336.644 dan naik hampir dua kali lipat pada tahun 2015 menjadi 121.394.185 . Terjadi kenaikan sebanyak 80,3% selama enam tahun (2009 – 2015), dengan rincian sebagai berikut :
  - Penambahan kendaraan bermotor terbesar terjadi pada jenis sepeda motor yaitu 87,4% atau rerata 14,6% per tahun.
  - Kemudian penambahan mobil penumpang sebanyak 70,4% atau rerata sebesar 11,7% pertahun.
  - Penambahan mobil barang sebanyak 47% atau rerata 7,8% pertahun.
  - Sementara laju pertumbuhan kendaraan bermotor jenis Bis hanya sebesar 12% atau hanya tumbuh 2% pertahun.

# Realisasi PNBP Jasa Kepolisian

Realisasi PNBP Jasa Kepolisian 2009 - 2015, LKPP Audited (Rp juta)							
Jenis PNBP :	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SIM	629.592	772.317	956.633	915.367	989.759	1.048.501	1.108.438
STNK	412.525	659.828	882.209	905.644	975.219	1.000.165	987.591
STCK	474	2.821	4.329	58.891	31.845	35.026	39.126
BPKB	468.645	708.817	896.526	884.787	894.039	912.881	818.551
TNKB	216.742	377.401	522.356	582.552	587.276	586.390	584.007
Klinik Pengemudi	26.472	27.333	31.082	29.067	28.547	27.432	28.188
Izin SENPI	1.854	3.115	2.377	2.167	2.624	2.528	2.737
<b>Total Pendapatan :</b>	<b>1.756.304</b>	<b>2.551.633</b>	<b>3.295.511</b>	<b>3.378.476</b>	<b>3.509.310</b>	<b>3.612.922</b>	<b>3.568.638</b>

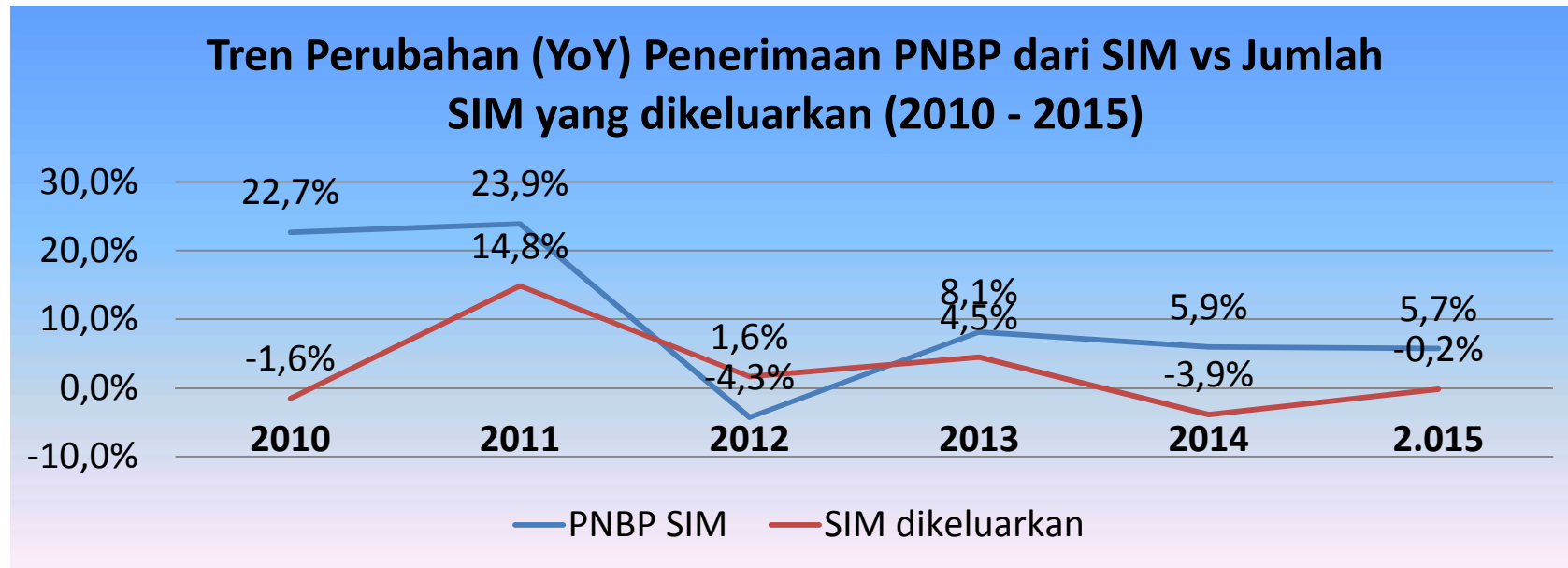
- Selama periode 2009 sampai 2015 realisasi PNBP dari jasa kepolisian tidak banyak mengalami peningkatan. Peningkatan yang terjadi lebih karena adanya kenaikan tarif dan penambahan jenis PNBP baru.
  - Kenaikan dari tahun 2009 ke tahun 2010 karena adanya PP baru yang menaikkan tarif pada jasa layanan lalu lintas pada tgl 25 mei 2010.
  - Sementara pada periode 2011 sampai 2015 relatif tidak terjadi peningkatan yang berarti dari realisasi PNBP jasa lalu lintas.
  - Bahkan ada kecenderungan penurunan penerimaan PNBP yaitu yang berasal dari penerimaan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), dimana sebesar Rp 896,5 miliar tahun 2011 dan menurun jadi Rp 818,5 miliar tahun 2015.



# Analisis Kewajaran PNBP di Kepolisian

- Tidak mudah untuk memonitoring dan menghitung kewajaran penerimaan PNBP di lingkungan kepolisian, hal ini karena :
  - Tidak adanya penjabaran atau sistim monitoring pengelolaan penerimaan, baik kuantitas (jumlah) maupun kualitas (nilai).
  - Dalam laporan kepolisian RI (lapkeu, lakip) tidak ada data yang cukup dan memadai perihal berapa kuantitas jumlah layanan yang sudah dikeluarkan serta berapa jumlah penerimanaan, baik tingkat nasional maupun daerah (satker). Bahkan dalam laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) realisasi penerimaan PNBP Kepolisian hanya disajikan secara gelondongan (total realisasi per jenis).
- Guna mengetahui perkiraan kewajaran penerimaan PNBP di kepolisian khususnya jasa lalu lintas, maka ICW menggunakan pendekatan analisis data sekunder; yaitu data dari LKPP (kemenkeu), statistik transportasi (BPS yang bersumber dari POLRI), dan data pendukung lainnya.

# Analisis Kewajaran PNBP Kepolisian - SIM



- Selama periode 2011 – 2015 dari sisi realisasi PNBP dari SIM hanya mengalami kenaikan sedikit. Realisasi PNBP SIM tahun 2011 Rp 956,6 miliar naik menjadi Rp 1.108,4 miliar tahun 2015, atau mengalami kenaikan 15,9% dalam 4 tahun.
- Sementara dari jumlah SIM yang dikeluarkan periode 2011 sampai 2015 hanya mengalami kenaikan sebanyak 165.468 lembar SIM atau 1,8%.
- Dari total realisasi penerimaan PNBP SIM, 2011 – 2015 Rp 5.018,7 miliar. Jika diasumsikan SIM yang diterbitkan adalah SIM Baru Semua (tarifnya lebih mahal dari perpanjangan), maka dengan perhitungan sederhana penerimaan PNBP SIM 2011 – 2015 adalah Rp 4.938,9 miliar.
- **Kesimpulan 1: Adanya ketidakcocokan antara data kuantitas layanan (jumlah SIM yang dikeluarkan) dengan realisasi penerimaannya.**
- **Dan ternyata kondisi yang sama juga terjadi pada objek penerimaan PNBP lalu lintas yang lain seperti, BPKB, TNKB, STNK.**

# Keputusan Menteri Keuangan No.342/KMK.02/2010

PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA :

1. Yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi Lalu Lintas, maksimal 94,32%,
2. Yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi intelijen dan keamanan, maksimal 91,29%,
3. Yang berasal dari pelayanan di bidang fungsi identifikasi yang bersumber dari penerimaan penerbitan Kartu Sidik Jari (*Inafis Card*), maksimal 86,49%,
4. Yang berasal dari penegakan hukum di bidang lalu lintas yang bersumber dari penerimaan denda pelanggaran lalu lintas, maksimal 91,22%.

# DIPA Korlantas 2016



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

## SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : SP DIPA- 060.01.1.642424/2016



DIG:9408-0039 5787-2152

### A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2015.

### B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- |                               |   |                       |  |
|-------------------------------|---|-----------------------|--|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : | (000)                 | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.  |
| 2. Unit Organisasi            | : | (01)                  | KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA   |
| 3. Provinsi                   | : | (01)                  | DKI JAKARTA.   |
| 4. Kode/Nama Satker           | : | (642424)              | KORLANTAS POLRI  |
| Sebesar                       | : | Rp. 4.169.353.161.000 | ( EMPAT TRILIUN SERATUS ENAM PULUH SEMBELAN MILIAR TIGA RATUS LIMA PULUH TIGA JUTA SERATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH ) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN  
03.01 KEPOLISIAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

### Terlampir

### C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	40.837.133.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNSP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNSP TA Berjalan	Rp.	4.128.516.628.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

### D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 4.169.353.161.000

### E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA ditul sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tercantum dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan, maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

JAKARTA, 07 Desember 2015  
A.N MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ASKOLANI  
NIP. 136006111982021001

# DIPA Korlantas 2016

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN  
TAHUN ANGGARAN 2016  
NOMOR : DIPA- 060.01.1.642424/2016  
IA. INFORMASI KINERJA**



010-9405-0038-0787-2152

Kementerian Negara/Lembaga : (060) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Unit Organisasi : (01) KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
Provinsi : (01) DKI JAKARTA  
Kode/Nama Satker : (642424) KORLANTAS POLRI

Kuasa Pengguna Anggaran : INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. CONDR0 KIRONO, M.M  
Bendahara Pengeluaran : KOMPOL HALIM RASYID, S.E  
Pejabat Penanda Tangan GPM : INSPEKTUR JENDERAL POLISI Drs. CONDR0 KIRONO, M.M

Halaman : 1A.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANIAN		4.169.353.161.000
Sub Fungsi	03.01	KEPOLISIAN		4.169.353.161.000
2 Program	060.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri		1.028.270.440.000
Hasil (Outcome)	01	Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materiil, kualitas dan jasa baik kualitas maupun kuantitas.		
IKU Program	01	Prosentase/jml kecukupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas guna memenuhi Standar Pelayanan Kamtibmas Prima.		
Kegiatan	3084	Pengembangan Peralatan Polri		919.621.115.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	% penambahan Almtasus Polri dari berbagai jenis pembiayaan dibandingkan tahun sebelumnya		
Keluaran (Output)	3084.997	Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	2.320,00 Unit	919.621.115.000
Kegiatan	5009	Dukungan Manajemen dan Teknik Sagpras		108.649.325.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Layanan perkantoran Sagpras		
Keluaran (Output)	5009.994	Layanan Perkantoran	12.00 Bulan Layanan	108.649.325.000
Program	060.01.05	Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri		2.485.777.000
Hasil (Outcome)	01	Mewujudkan aparatur Polri yang profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas Polri secara profesional		
IKU Program	01	Jumlah Pendidik dan Tenaga Pendidikan Diklat Polri yang memenuhi standar kompetensi melalui uji kompetensi		
	02	Jumlah Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri terakreditasi		
	03	Standar pelayanan pendidikan dan pelatihan Polri		
Kegiatan	3100	Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Polri		2.485.777.000
Indikator Kinerja Kegiatan	001	Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Polri		
Keluaran (Output)	3100.004	Pelaksanaan Diklat	51.00 Orang	2.485.777.000
Program	060.01.10	Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		3.138.596.944.000
Hasil (Outcome)	01	Memelihara dan meningkatkan kondisi keastrotan dan ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktivitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yan		
IKU Program	01	Jumlah Kriminalitas yang dapat ditindak oleh fungsi Bahakam Polri		
	02	Jumlah kegiatan pengaturan penjagaan patroli dan pengawasan di jalan raya		
	03	Jumlah Patrol perairan dan udara di seluruh wilayah hukum RI		

# Kesimpulan dan Rekomendasi :

- Penerimaan negara merupakan penyokong utama pembangunan, maka optimalisasi sumber – sumber pendapatan negara (pajak dan non pajak) haruslah menjadi perhatian utama. Kondisi yang sama juga seharusnya terjadi di sisi pengeluaran (belanja) negara, dimana efisiensi, efektivitas dan kemanfaatan harus menjadi acuan dalam pengeluaran negara.
- Disisi lain, optimalisasi anggaran masih menjadi persoalan dalam APBN Indonesia, yaitu tidak optimalnya penerimaan dan tidak efisiennya pengeluaran. Bahkan dalam beberapa contoh hal ini terjadi karena maraknya praktek korupsi dan penyimpangan.
- Kepolisian RI sebagai institusi yang mengedepankan pelayanan dan perlindungan warga negara (APH) sudah seharusnya menjadi contoh dalam tata kelola keuangan negara yang baik dan bertanggung jawab.
- Dalam konteks APBN; Kepolisian RI yang juga diserahi tugas memungut penerimaan negara (PNBP), disisi lain juga melakukan pembelajaran dari hasil penerimaan tersebut.

# Kesimpulan dan Rekomendasi 2:

- Kenaikan tarif dan penambahan jenis objek PNBPN pada satu sisi bisa dimaknai sebagai usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Tetapi hal ini akan menjadi sia-sia jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan.
- Persoalan transparansi dan akuntabilitas yang belum tercermin dalam pengelolaan PNBPN di kepolisian haruslah menjadi PR utama, tentunya mencakup tata kelola sisi penerimaan dan juga sisi pembelanjaan.
  - Keterbukaan data yang mencakup jumlah (kuantitas), nilai dari tiap jenis PNBPN. Hal ini harus dilaporkan dan disajikan dalam Laporan keuangan dan kinerja.
  - Transparansi dalam perencanaan anggaran termasuk mekanisme pengadaan barang dan jasa di POLRI.
- Perbaikan regulasi dan aturan khususnya terkait pengelolaan PNBPN serta penggunaannya harus menjadi koridor yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan keadilannya.
- Kasus korupsi proyek Simulator SIM haruslah menjadi momentum dalam perbaikan tata kelola serta semangat anti korupsi di lingkungan POLRI.

**Sekian & Terimakasih**